



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
SENIN, 30 AGUSTUS 2021

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang membahas **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar **Rp. 252,69 milyar** (*dua ratus lima puluh dua koma enam puluh sembilan milyar rupiah*). Adapun rincian pagu anggaran tahun 2022 menurut satker adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan)

No	Satuan Kerja	Program Dukungan Manajemen			Program KGPPA (Non Operasional)	TOTAL
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	Sekretariat Kementerian	97.463.435	26.238.772	123.702.207	---	123.702.207
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.760.382	1.239.618	4.000.000	17.050.000	21.050.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.427.686	1.272.314	3.700.000	16.850.000	20.550.000
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2.167.046	1.582.954	3.750.000	10.729.117	14.479.117
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	4.304.462	1.558.278	5.862.740	25.339.760	31.202.500

6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	4.168.546	1.406.470	5.575.016	22.224.984	27.800.000
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	8.457.123	1.755.005	10.212.128	3.698.004	13.910.132
Jumlah		121.748.680	35.053.411	156.802.091	95.891.865	252.693.956

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

- Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI sebesar **Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah)** dengan alokasi untuk :

NO	KEGIATAN	SATKER
1	Seleksi Calon Anggota Komisioner KPAI Periode 2022 - 2027	Sekretariat KPAI
2	Fasilitasi dalam Peningkatan PUG di Forum G20	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3	Dukungan dan <i>Side Event G20 Empower</i> dalam rangka <i>Presidency Indonesia</i> Tahun 2022	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
4	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
5	Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
6	Pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Semua Satker Kedeputian
7	Kekurangan Belanja Pegawai	Sekretariat Kementerian

3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
- a. Meningkatkan usulan tambahan anggaran tahun 2022 dan di alokasikan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain: pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, pengembangan model desa ramah perempuan dan peduli anak, serta forum perempuan desa atau perempuan pelopor desa.
 - b. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, semisal pengemis dan anak jalanan.
 - c. Mensinkronisasi antara target hasil yang akan di capai sebagaimana 5 (lima) arahan Presiden dengan rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan Komisi VIII DPR dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



H. MARWAN DASOPANG

**MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK RI,**



I Gusti Ayu Bintang Darmawati